



Strategi Perbankan Indonesia Terhadap Eksistensi Bank Dalam Pasar Valuta Asing Guna Mendukung Penguatan Rupiah di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global

Mohammad Fariz Nur Agung Hermawan¹, Rafli Muhammad Hafidz², Rizky Nanda Rifa'i³, Suwarsit Suwarsit⁴

¹²³Universitas Negeri Semarang, ⁴Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktober 29, 2024

Accepted November 15, 2024

Available online 19 November, 2024

Keywords:

valas, bank indonesia, moneter

Keywords:

forex, bank indonesia, monetary



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Salah satu komponen terpenting dalam stabilitas ekonomi nasional dan internasional adalah pasar valuta asing, atau valas. Sebagai pelaku utama di sektor keuangan, bank memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan arus devisa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan peraturan Bank Indonesia (BI) adalah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pasar valuta asing di Indonesia. Perubahan-perubahan di seluruh dunia juga membuat BI dan OJK semakin penting untuk bekerja sama secara lebih erat, BI harus memastikan bahwa kebijakan makroprudensial BI melengkapi prosedur pengawasan mikroprudensial OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas stabilitas moneter. Sebagai bank sentral negara, tanggung jawab utama BI adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. BI sering melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar Rupiah dalam rangka menjalankan fungsinya. BI juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas perbankan di Indonesia

untuk mencegah bencana keuangan. Menghadapi faktor-faktor internasional yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dan stabilitas ekonomi domestik sangatlah penting. Secara umum, pengetatan pengawasan terhadap bank-bank yang terlibat dalam transaksi valuta asing bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan mendorong pasar yang lebih transparan dan bertanggung jawab di samping menjaga stabilitas nilai tukar.

ABSTRACT

One of the most important components in national and international economic stability is the foreign exchange market, or forex. As a major player in the financial sector, banks have a very important strategic role in maintaining exchange rate stability and controlling foreign exchange flows. Law No. 7/2011 on Currency, Law No. 23/1999 on Bank Indonesia, as last amended by Law No. 6/2009, and Bank Indonesia (BI) regulations are some of the laws relating to the foreign exchange market in Indonesia. Changes around the world have also made it more important for BI and OJK to work more closely together, BI must ensure that BI's macroprudential policies complement OJK's microprudential supervisory procedures as the institution responsible for monetary stability. As the country's central bank, BI's primary responsibility is to maintain the stability of the Rupiah exchange rate. BI often intervenes in the foreign exchange market to control the movement of the Rupiah exchange rate in order to carry out its functions. BI is also responsible for supervising and controlling banking activities in Indonesia to prevent financial disasters. Dealing with international factors that affect currency exchange rates and domestic economic stability is crucial. In general, the tightening of supervision of banks involved in foreign exchange transactions aims to promote sustainable national economic growth by encouraging a more transparent and responsible market in addition to maintaining exchange rate stability.

PENDAHULUAN

Pasar valuta asing (foreign exchange market/forex) merupakan salah satu elemen krusial dalam stabilitas ekonomi global dan nasional. Perbankan, sebagai pelaku utama dalam pasar keuangan, memiliki peran strategis dalam mengelola aliran valuta asing dan mendukung stabilitas nilai tukar. Di Indonesia,

*Corresponding Author

E-mail addresses: fariznuragung27@students.unnes.ac.id¹, hafidz21@students.unnes.ac.id², riskirifai77@students.unnes.ac.id³, suwarsit@upnvi.ac.id⁴

pasar valuta asing menjadi salah satu pilar penting dalam menentukan nilai tukar rupiah, yang secara langsung mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, investasi asing, hingga inflasi. Dalam konteks ini, eksistensi bank dalam pasar valuta asing menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian khusus, terutama di tengah fluktuasi ekonomi global yang semakin dinamis. Fluktuasi ekonomi global yang terjadi akibat ketidakpastian geopolitik, perang dagang, pandemi, hingga perubahan kebijakan moneter negara maju seperti Amerika Serikat, berdampak signifikan terhadap stabilitas rupiah. Penguatan dolar AS, misalnya, sering kali menekan nilai tukar rupiah, yang kemudian meningkatkan risiko inflasi domestik dan memperburuk defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas dan impor barang modal, stabilitas rupiah menjadi salah satu indikator penting bagi kredibilitas ekonomi Indonesia di mata investor global. Oleh karena itu, strategi yang efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan prioritas utama, dan perbankan memiliki peran vital dalam mewujudkannya.

Perbankan di Indonesia tidak hanya berperan sebagai intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam pasar valuta asing melalui aktivitas transaksi spot, forward, dan swap. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memberikan kerangka regulasi dan kebijakan untuk mengawasi aktivitas perbankan di pasar valuta asing, guna memastikan stabilitas nilai tukar serta melindungi cadangan devisa.¹ Namun, tantangan yang dihadapi perbankan dalam mendukung penguatan rupiah tidaklah sederhana. Bank-bank harus mampu menavigasi risiko pasar yang kompleks, termasuk volatilitas nilai tukar, likuiditas pasar, dan dampak kebijakan global terhadap aliran modal.

Hukum terkait pasar valuta asing di Indonesia meliputi berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Peraturan ini mengatur peran perbankan, kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Indonesia, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian valuta asing. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memiliki mandat untuk menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan pengawasan aktivitas di pasar valuta asing. Di sisi lain, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas rupiah, seperti implementasi Local Currency Settlement (LCS) dengan mitra dagang utama, intervensi pasar melalui mekanisme triple intervention, dan penguatan cadangan devisa.² Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional serta menciptakan ekosistem pasar valuta asing yang lebih stabil dan inklusif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan perbankan sebagai ujung tombak implementasi di lapangan.

Dengan memahami dinamika pasar valuta asing dan peran strategis perbankan, strategi yang tepat dapat diimplementasikan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah fluktuasi ekonomi global. Upaya ini tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal ini menjadikan penguatan strategi perbankan dalam pasar valuta asing sebagai langkah strategis yang harus terus dioptimalkan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis literatur, studi dokumen hukum, dan tinjauan regulasi perbankan terkini. Data dan informasi yang relevan akan dikumpulkan dari sumber-sumber yang diverifikasi, seperti jurnal ilmiah, laporan riset, peraturan perundang-undangan, dan publikasi terkait hukum perbankan. Analisis komprehensif akan dilakukan untuk menggambarkan peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum perbankan di era fluktuasi ekonomi global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas regulasi hukum perbankan di Indonesia dalam mendukung stabilitas rupiah

Regulasi perbankan di Indonesia saat ini masih sangat berperan dalam mendukung stabilitas rupiah, terutama di tengah tantangan ekonomi global. Regulasi yang ketat dan adaptif, yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membantu menjaga kesehatan sektor perbankan dan mencegah risiko sistemik. Pengaturan dan pengawasan macroprudential yang merupakan tugas peraturan perbankan, dengan menerapkan metode analisis macroprudential yang nantinya untuk mengevaluasi tingkat kesehatan, kekuatan dan tentang dampak terhadap sistem keuangan bila terjadi

¹ Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2021). Peran Bank Indonesia Dan Pembangunan Hukum Di Bidang Moneter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 393-411.

² Haris, I. (2022). Kebijakan Local Currency Settlement Di Indonesia. *Journal Of Islamic Business Management Studies (Jibms)*, 3(2), 108-119.

krisis. dalam era ketidakpastian ekonomi global Pengaturan dan pengawasan makroprudensial di Indonesia menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika fluktuasi global. Perubahan cepat dalam kondisi ekonomi internasional, seperti volatilitas nilai tukar, kenaikan suku bunga global, dan gejolak pasar keuangan, menambah tantangan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan domestik. Dalam konteks ini, pengembangan metode analisis makroprudensial oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis. Analisis tersebut membantu mengevaluasi kesehatan sistem keuangan secara menyeluruh dan memitigasi dampak krisis global terhadap stabilitas keuangan Indonesia.

Fluktuasi global juga mendorong pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara BI dan OJK. Sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab pada stabilitas moneter, BI perlu memastikan bahwa kebijakan makroprudensialnya selaras dengan langkah-langkah pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga keseimbangan sistem keuangan tetapi juga meningkatkan daya tahan sektor perbankan terhadap guncangan eksternal.³

Dalam implementasinya, OJK menggunakan pendekatan berbasis kepatuhan (Compliance-Based Supervision/CBS) dan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBS) untuk mengidentifikasi risiko yang timbul akibat volatilitas ekonomi global. Pendekatan ini memungkinkan OJK untuk memberikan respons yang cepat dan tepat waktu dalam mencegah eskalasi risiko yang dapat membahayakan stabilitas sektor keuangan domestik. Selain itu, BI terus memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari sektor perbankan untuk mendukung kebijakan moneter yang adaptif terhadap tekanan eksternal.

Namun, tantangan besar tetap ada, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni. Dalam era fluktuasi global, kompleksitas aktivitas keuangan, seperti meningkatnya penggunaan teknologi finansial (fintech) dan inovasi produk keuangan lainnya, memperumit pengawasan. Risiko siber dan keamanan data, yang sering kali berakar dari ketergantungan pada teknologi, menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah strategis perlu dilakukan, termasuk penguatan kerjasama lintas lembaga di tingkat nasional dan internasional. BI dan OJK juga perlu mengadopsi teknologi mutakhir, seperti analisis berbasis kecerdasan buatan, untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap risiko sistemik. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dapat memperkuat pengawasan serta mempercepat adaptasi sektor keuangan terhadap kondisi global yang terus berubah.

Era fluktuasi global ini menuntut pengawasan yang lebih fleksibel dan proaktif. Dengan integrasi kebijakan yang lebih baik antara BI dan OJK, diharapkan sistem keuangan Indonesia mampu tetap stabil dan tangguh menghadapi tantangan global, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial di Indonesia menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika fluktuasi global. Perubahan cepat dalam kondisi ekonomi internasional, seperti volatilitas nilai tukar, kenaikan suku bunga global, dan gejolak pasar keuangan, menambah tantangan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan domestik. Dalam konteks ini, pengembangan metode analisis makroprudensial oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis. Analisis tersebut membantu mengevaluasi kesehatan sistem keuangan secara menyeluruh dan memitigasi dampak krisis global terhadap stabilitas keuangan Indonesia.

Fluktuasi global juga mendorong pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara BI dan OJK. Sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab pada stabilitas moneter, BI perlu memastikan bahwa kebijakan makroprudensialnya selaras dengan langkah-langkah pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga keseimbangan sistem keuangan tetapi juga meningkatkan daya tahan sektor perbankan terhadap guncangan eksternal.

Dalam implementasinya, OJK menggunakan pendekatan berbasis kepatuhan (Compliance-Based Supervision/CBS) dan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBS) untuk mengidentifikasi risiko yang timbul akibat volatilitas ekonomi global. Pendekatan ini memungkinkan OJK untuk memberikan respons yang cepat dan tepat waktu dalam mencegah eskalasi risiko yang dapat membahayakan stabilitas sektor keuangan domestik. Selain itu, BI terus memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari sektor perbankan untuk mendukung kebijakan moneter yang adaptif terhadap tekanan eksternal. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni. Dalam era fluktuasi global, kompleksitas aktivitas keuangan, seperti meningkatnya penggunaan teknologi finansial (fintech) dan inovasi produk keuangan lainnya, memperumit

³ Keliat, V. U. (2024). Peran Regulasi Terkini Dalam Mengatasi Tantangan Hukum Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 323-331.

Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan

pengawasan. Risiko siber dan keamanan data, yang sering kali berakar dari ketergantungan pada teknologi, menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah strategis perlu dilakukan, termasuk penguatan kerja sama lintas lembaga di tingkat nasional dan internasional. BI dan OJK juga perlu mengadopsi teknologi mutakhir, seperti analisis berbasis kecerdasan buatan, untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap risiko sistemik. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dapat memperkuat pengawasan serta mempercepat adaptasi sektor keuangan terhadap kondisi global yang terus berubah. Era fluktuasi global ini menuntut pengawasan yang lebih fleksibel dan proaktif. Dengan integrasi kebijakan yang lebih baik antara BI dan OJK, diharapkan sistem keuangan Indonesia mampu tetap stabil dan tangguh menghadapi tantangan global, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Penguatan pengawasan bank yang berpartisipasi dalam valuta asing

Melalui berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial, Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Indonesia melalui berbagai kebijakan makroprudensial dan moneter. Tugas utama BI, sebagai bank sentral negara, adalah menjaga stabilitas nilai Rupiah. Dalam rangka menjalankan peran ini, BI sering kali masuk ke pasar valuta asing untuk mengatur pergerakan nilai tukar Rupiah. Untuk mencegah terjadinya bencana keuangan, BI juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi operasi perbankan di Indonesia. Krisis keuangan Peran BI mencakup regulasi perbankan selain aspek moneter. regulasi perbankan. BI memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perbankan, termasuk rasio cadangan wajib, kebijakan suku bunga acuan, dan undang-undang lainnya. peraturan-peraturan tambahan. Dengan menerapkan aturan-aturan tersebut, BI berharap dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus menumbuhkan lingkungan perbankan yang aman dan sehat. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, dan mendorong lingkungan perbankan yang aman dan sehat.⁴

BI secara aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional di samping fungsi domestiknya. Sebagai peserta aktif di sejumlah organisasi keuangan internasional, BI berpartisipasi dalam diskusi dan berkolaborasi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi global. Dengan demikian, misi BI mencakup kontribusi dan koneksinya di bidang keuangan internasional di samping posisinya di tingkat nasional. Peran utama Bank Indonesia dalam perbankan Indonesia diatur oleh undang-undang yang mendukung tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Otoritas hukum untuk Bank Indonesia diatur oleh dua undang-undang utama: Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan landasan hukum jangka panjang bagi eksistensi dan peran strategis Bank Indonesia dalam mengawasi dan mengendalikan industri perbankan.

Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri perbankan. Kerangka hukum untuk pendirian dan pengelolaan lembaga keuangan di Indonesia diuraikan dalam UU No. 10 tahun 1998. Dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas, dan kepercayaan dalam transaksi keuangan, undang-undang ini telah berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan perbankan. Ketentuan-ketentuan hukum yang penting termasuk memperkuat pengawasan, membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menekankan praktik-praktik perbankan yang bertanggung jawab, dan mengharuskan adanya manajemen risiko. Selain itu, fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang otonom juga ditekankan dalam UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terpisah. Undang-undang ini menguraikan posisi, tanggung jawab, dan kekuasaan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan Bank Indonesia untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, menjaga nilai rupiah, serta mengawasi dan mengatur perbankan.

Salah satu hal terpenting yang dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar mata uang domestik dan stabilitas sistem keuangan adalah mengawasi bank-bank yang terlibat dalam pasar valuta asing (valas). BI memainkan beberapa peran penting dalam konteks ini. Pertama dan terutama, BI bertanggung jawab untuk memantau aktivitas perdagangan mata uang secara real time. Hal ini mencakup pemantauan transaksi untuk mengidentifikasi kemungkinan manipulasi pasar atau pelanggaran peraturan yang dapat membahayakan stabilitas keuangan. Kedua, BI memberlakukan peraturan yang mengontrol pasar valuta asing, seperti peraturan yang berkaitan dengan batas posisi perdagangan, pelaporan transaksi, dan perdagangan margin. Diharapkan bahwa pasar valas akan dapat berfungsi lebih efisien dan terbuka dengan adanya aturan-aturan ini, sehingga melindungi investor dari taktik-taktik yang tidak jujur. Ketiga, BI secara berkala memverifikasi bahwa para pelaku pasar mematuhi peraturan

⁴ Dea Nurhanifah, Ari Maulana, Aria Dwi Fahrezi & Farid Chaidar Pasya.(2024).Peran Bank Indonesia Dalam Perlindungan Perbankan.*Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 328-335.

yang berlaku. Hukuman administratif seperti denda atau pencabutan izin dapat diterapkan jika ditemukan pelanggaran.

Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan, BI juga telah merilis sejumlah peraturan baru yang dirancang untuk menciptakan pasar mata uang kontemporer yang diakui secara global. Hal ini melibatkan pengaturan uang dan koordinator transaksi pasar valas dengan tetap menjaga integritas dan keterbukaan sistem keuangan. Dengan menggunakan strategi ini, BI berharap dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan menumbuhkan atmosfer yang mendukung ekspansi ekonomi. Selain itu, pendekatan pengawasan BI juga mencakup kerja sama di seluruh dunia. BI dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan regulasi di pasar valuta asing dengan membina kemitraan dengan otoritas keuangan lainnya. Menghadapi faktor-faktor internasional yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dan stabilitas ekonomi domestik sangatlah penting. Secara umum, pengetatan pengawasan terhadap bank-bank yang terlibat dalam transaksi valuta asing bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan mendorong pasar yang lebih transparan dan bertanggung jawab di samping menjaga stabilitas nilai tukar.⁵

SIMPULAN

1. Regulasi perbankan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan strategis dalam menjaga stabilitas rupiah dan sektor keuangan di tengah fluktuasi ekonomi global. Pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial saling melengkapi untuk mengelola risiko sistemik serta meningkatkan daya tahan perbankan terhadap guncangan eksternal. BI menggunakan analisis data untuk kebijakan adaptif, sementara OJK mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan untuk merespons tantangan global, seperti volatilitas nilai tukar, risiko siber, dan inovasi keuangan. Kolaborasi lintas lembaga, adopsi teknologi canggih, dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, tangguh, dan responsif terhadap perubahan global.
2. Bank Indonesia (BI) berperan menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan melalui kebijakan moneter, pengawasan pasar valuta asing, dan regulasi perbankan. BI memantau aktivitas perdagangan mata uang, memberlakukan peraturan untuk transparansi, dan menindak pelanggaran guna mencegah manipulasi pasar. Kerangka hukum seperti **UU No. 23/1999** dan **UU No. 10/1998** memberikan landasan bagi BI untuk mengatur perbankan dan memastikan praktik keuangan yang bertanggung jawab. Selain itu, BI berkolaborasi dengan otoritas internasional untuk meningkatkan stabilitas ekonomi global, menciptakan pasar valuta asing yang modern, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90-93. (n.d.).
- Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2021). Peran Bank Indonesia Dan Pembangunan Hukum Di Bidang Moneter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 393-411.
- Haris, I. (2022). KEBIJAKAN LOCAL CURRENCY SETTLEMENT DI INDONESIA. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 3(2), 108-119.
- Keliat, V. U. (2024). PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 323-331. (n.d.).
- Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90-93. (n.d.).

⁵ Ningtiyas, S. D. A., Maghfiroh, S., Hasan, H. M., & Astuti, R. P. (2024). Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 723-726.